

Pejabat Dinkes Banten Didakwa Manipulasi Harga Pengadaan Masker

SERANG (IM)- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Lia Susanti didakwa memanipulasi data harga satuan untuk pengadaan 15 ribu masker Covid-19 untuk tenaga kesehatan senilai Rp 3,3 miliar. Manipulasi itu ia susun di Rencana Anggaran Belanja atau RAB milik Pemprov pada Maret 2020.

"Terdakwa selaku PPK melakukan manipulasi data harga satuan dalam penyusunan RAB dana belanja tidak terduga (BTI) tahun anggaran 2020 di Dinkes pada 26 Maret khusus untuk anggaran pengadaan masker KN95 sebanyak 15 ribu buah," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU), Herlambang di PN Serang, Jalan Serang-Pandeglang, Rabu (28/7).

JPU mengatakan, manipulasi data tersebut melalui mark up harga satuan dari yang seharusnya Rp 70 ribu menjadi Rp 220 ribu. Mark up ini melalui persetujuan antara terdakwa lain yaitu Wahyudin Firdaus dari PT Right Asia Media melalui penawaran yang disampaikan.

"Penawaran tanpa bukti pendukung kewajaran harga berupa dokumen menjelaskan struktur harga penawaran yang relevan pada saat pelaksanaan pengadaan," tambahnya yang dihadirkan terdakwa secara online.

Penunjukan terdakwa melalui surat perintah kerja atau SPK dan surat perjanjian ke PT RAM juga bermasalah karena perusahaan itu bukan pemegang sertifikat distribusi alat kesehatan dari Kementerian. Bukan penyedia barang e-katalog hingga bukan penyedia pekerjaan sejenis.

"Terdakwa tidak melaksanakan tugas monitoring, pelaksanaan pekerjaan dan memastikan kewajaran harga," ujarnya.

Akibat perbuatan terdakwa JPU menilai timbul kerugian negara senilai Rp 1,6 miliar. Ia didakwa melakukan korupsi sebagaimana Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Tipikor.

Sidang dakwaan untuk Lia sendiri sempat tertunda sepekan karena alasan sakit. Dua terdakwa lain yaitu Direktur PT RAM Wahyudin Firdaus dan rekannya Agus Suryadinata.

Di dakwaan untuk Lia, nama Kepala Dinas Kesehatan, Ati Pramudji Hastuti juga tetap disebut sebagai orang yang menandatangani dokumen RAB pengadaan masker Covid-19 ini. Padahal dokumen tersebut adalah hasil manipulasi bawahannya bersama para terdakwa lain.

"Data harga dari PT RAM dalam surat penawaran masker KN95 sebanyak 15 ribu buah dengan harga Rp 220 ribu sesuai persetujuan terdakwa kemudian ditandatangani oleh saksi Ati Pramudji Hastuti," kata JPU. ● **pra**



SIDAK MENTERI SOSIAL KE KOTA TANGERANG

Menteri Sosial Tri Rismaharini (tengah) berbincang dengan warga saat sidak di Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten, Rabu (28/7). Sidak tersebut untuk mengetahui dan memastikan penyaluran bantuan sosial tunai (BST) di Kota Tangerang tepat sasaran.

MUSIM KEMARAU TIBA

BPBD Banten: Waspada Kebakaran Hutan dan Permukiman

Selama ini, wilayah Banten masuk kategori daerah rawan bencana alam jika memasuki musim kemarau. Untuk mengantisipasi bencana alam akibat kemarau tersebut, pihak BPBD Banten menerjunkan tim Bidang Pencegahan dan berkoordinasi dengan BPBD kabupaten dan kota.

LEBAK (IM)- Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Banten meminta masyarakat mewaspadai kebakaran hutan dan pemukiman

serta kekeringan sehubungan musim kemarau tahun ini. "Peringatan kewaspadaan kemarau itu agar tidak menimbulkan potensi bencana alam,"

kata Kepala Pelaksana BPBD Banten, Nana Suryana saat dihubungi di Lebak, Rabu (28/7). BPBD Banten memasuki musim kemarau ini terus melakukan upaya pencegahan kebakaran, termasuk kebakaran hutan agar tidak menimbulkan bencana alam.

Potensi bencana alam akibat kemarau, yakni kebakaran kehutanan di Kabupaten Lebak dan Pandeglang, karena terdapat kawasan hutan milik Perum Perhutani, termasuk kawasan hutan nasional.

Selain itu, katanya, musim kemarau juga berpotensi mengakibatkan kebakaran di permukiman padat penduduk seperti di Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang.

Kemarau juga dapat menimbulkan kekeringan yang menyebabkan terjadinya krisis pasokan air bersih, seperti di wilayah selatan Lebak, Tangerang Selatan, Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang wilayah selatan.

"Kami minta warga tetap waspada memasuki musim kemarau itu," katanya.

Untuk mengantisipasi bencana alam akibat kemarau, pihaknya juga menerjunkan tim Bidang Pencegahan dan berkoordinasi dengan BPBD kabupaten dan kota.

Tim Bidang Pencegahan

BPBD Banten menyosialisasikan kepada masyarakat agar aktivitas mereka tidak menimbulkan kebakaran permukiman maupun kebakaran kawasan hutan.

Tim pencegahan juga mempersiapkan alat evakuasi dilengkapi logistik guna penyelamatan korban jika terjadi bencana itu.

Selama ini, kata dia, wilayah Banten masuk kategori daerah rawan bencana alam jika memasuki musim kemarau.

"Kami berharap masyarakat tidak buang puntung rokok ke semak belukar di tengah musim kemarau guna mencegah kebakaran hutan," katanya. ● **pra**

JAMIN SELEKSI DI LEMBAGANYA BERSIH DAN TRANSPARAN

Membludak, Peminat CPNS di Kanwil Kemenkumham Banten

SERANG (IM)- Peminat calon pegawai negeri sipil (CPNS) di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Banten membludak.

Hingga pendaftaran ditutup, peminat mencapai sekitar 9.000 pelamar. Sementara kuota CPNS Kanwil Kemenkumham Banten hanya 80 formasi.

Kepala Kanwil Kemenkumham Banten, Agus Toyib, MH mengatakan, proses penerimaan dan seleksi CPNS di lingkungan Kemenkumham Banten dilakukan secara online. "Kontak fisik tidak ada," kata Agus, Rabu (28/7).

Kata Agus, saat ini panitia sedang memverifikasi semua berkas pelamar yang masuk. Bagi pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi yang akan mengikuti tes-tes berikutnya. Salah satu persyaratan administrasi yang harus memenuhi persyaratan adalah pelamar harus ber-KTP Banten. "Tes CAT diperkirakan pada Agustus mendatang," ujarnya lagi.

Agus menjabarkan bahwa seleksi CPNS di lingkungan Kemenkumham Banten berlangsung fair, bersih, transparan dan tidak ada KKN. "Saya jamin itu, karena memang sangat ketat di sini. Pelamar yang lolos adalah pelamar-pelamar yang benar-benar berjuang secara bersih dan fair. Tidak ada KKN," pungkasnya. ● **pra**

Gubernur Banten: Pelaksanaan PPKM Level 4 dan 3 Butuh Dukungan Masyarakat

SERANG (IM)- Gubernur Banten, Wahidin Halim mengungkapkan, pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 dan Level 3 di Provinsi Banten membutuhkan dukungan masyarakat. Hal itu untuk menekan peningkatan kasus atau penyebaran dan penularan Covid-19 di Provinsi Banten.

"Secara substansial adalah sama antara PPKM

Darurat dengan PPKM Level 4 dan Level 3. Pada PPKM Level 4 dan Level 3, tracing dan penyekatan lebih dalam. Tentunya dilakukan dengan pemantauan dan pengawasan disertai dengan sanksi-sanksi ringan," ungkap Gubernur Wahidin di Rumah Dinas Gubernur di Kota Serang, kemarin.

"Saya berharap agar masyarakat mentaati segenap arahan maupun instruksi dari Pemerintah. Karena penyebab

Covid-19 semakin cepat, semakin meningkat. Tentunya berdampak pada kegiatan ekonomi masyarakat, termasuk pada layanan kesehatan," tambahnya.

Dikatakan, permasalahan yang dihadapi sebelumnya adalah rumah sakit sempat penuh, oksigen sempat tidak ada atau hilang dari pasar. Namun sekarang Provinsi Banten relatif aman untuk penyediaan oksigen.

"Sekarang kita sedang merumuskan pengaturan regulasi tentang pelaksanaan PPKM Level 4 dan Level 3. Ada hal-hal yang secara teknis perlu kita atur," ungkap Gubernur.

Dikatakan, untuk industri yang memiliki IOMKI (Ijin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri) boleh beroperasi dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Begitu juga usaha yang

termasuk sektor kritikal dan esensial dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan secara ketat.

Dalam kesempatan itu, Gubernur kembali mengimbau warga masyarakat untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan, khususnya dalam memakai masker secara benar. Hal itu sebagai bentuk melindungi diri dan orang lain dari penularan dan penyebaran Covid-19. ● **pra**

Penerima Bansos di Kabupaten Tangerang 297 Ribu Keluarga

TANGERANG (IM)- Dinas Sosial Kabupaten Tangerang mencatat sebanyak 297.443 keluarga di Kabupaten Tangerang menjadi penerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial RI. Bantuan tersebut mulai disalurkan kepada para penerima di Kabupaten Tangerang sejak Senin (26/7).

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tangerang, Ujat Sudrajat mengatakan, bantuan yang didistribusikan kepada ratusan ribu keluarga tersebut berasal dari tiga program. Yakni program keluarga harapan (PKH), bantuan non tunai (BPN), dan bantuan sosial tunai (BST) yang bersumber dari APBN.

"Bantuan tersebut berupa beras 10 kilogram (kg) untuk KPM PKH, BPN, serta uang tunai sebesar Rp 600 ribu untuk KPM BST," kata Ujat dalam keterangannya, dikutip Rabu (28/7).

Dalam proses distribusi bansos, Dinsos Kabupaten Tangerang menggandeng Bulog sebagai penyedia beras, serta PT Pos Indonesia sebagai penyalur bantuan.

Ujat menyampaikan, selain bantuan berupa beras 10 kg dan BST, Kemensos RI juga menyalurkan 3.000 paket beras dengan jatah lima kg per KPM di Kabupaten Tangerang. Itu merupakan bantuan di luar ketiga program tersebut.

Dia menambahkan, pihaknya juga terus menyalurkan bantuan sosial kepada warga yang tengah menjalani isolasi mandiri (isoman) di rumah dengan menggunakan dana corporate social responsibility (CSR) perusahaan. "Untuk bantuan sembako, warga yang sedang isoman bisa melaporkan ke RT/RW dan akan didata kelurahan/kecamatan untuk pengajuan bantuan sembako ke Dinsos Kabupaten Tangerang," jelas Ujat. ● **pp**

BOR Khusus Covid-19 di RS Kota Tangerang Kini 73 Persen

TANGERANG (IM)- Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tangerang mencatat, tingkat ketensian kasur (bed occupancy rate/BOR) khusus Covid-19 di RS rujukan di sana mencapai angka 73,47 persen per 27 Juli 2021.

Kepala Dinkes Kota Tangerang, Liza Puspawati berujar, BOR tersebut menurun sejak diterapkannya pembatasan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat dan PPKM level 4 mulai 3-25 Juli 2021. Sebelumnya, BOR di 33 RS di Kota Tangerang sempat mencapai 93 persen.

Saat ini, dari total 2.005 kasus khusus pasien Covid-19, terisi sekitar 1.473 tempat tidur. Liza juga menyebutkan, BOR di rumah isolasi terkonsentrasi (RIT) di Kota Tangerang saat ini menyentuh angka 33,75 persen.

Di RIT tersebut terisi sekitar 120 kasus dari 434 tempat tidur.

Kata dia, angka ketensian itu terus melandai seiring dengan angka kesembuhan pasien atau orang tanpa gejala (OTG) yang menjalani isolasi mandiri (isoman). "Berdasarkan aplikasi SilLacak dan Sirona, untuk angka kesembuhan yang OTG atau isoman di rumah itu mencapai 98 persen," papar Liza dalam keterangannya, Rabu (28/7).

"Sedangkan yang berpindah dari kondisi OTG menjadi berat dan kritis itu hanya satu hingga dua persen saja," sambungnya.

Menurut Liza, banyak OTG yang menjalani isoman di kediaman dan tidak dirawat di RIT. Pasien yang isoman di kediamannya mendapatkan pasokan obat-obatan dan makanan dari

puskesmas setempat.

Dia berujar, sekitar 90 persen pasien yang dirawat di RS belum menerima vaksinasi Covid-19, sedangkan pasien yang isoman kebanyakan telah menerima vaksin. "Saya tegaskan, vaksin tidak menjanjikan tidak terpapar Covid-19, tapi menjangkiti Covid-19 yang lebih ringan. Hal itu pun terbukti dalam kondisi pasien Covid-19 di Kota Tangerang saat ini," tutur dia.

Meski demikian, Liza mengimbau agar masyarakat di Kota Tangerang tetap mematuhi protokol kesehatan. Petugas yang menangani Covid-19 pun diimbau tidak jenuh saat bekerja di lapangan. "Angka-angka menunjukkan kabar baik, tapi jangan lengah, kita semua harus konsisten dengan gerakan di lapangan," imbau dia. ● **pp**



PANEN MADU HASIL BUDI DAYA DI BOGOR

Petani memperlihatkan sarang madu yang dihasilkan lebah madu (Apis Cerana) saat panen di Saung Lebah Madu Paseban, Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (28/7). Madu serta sarang madu yang dihasilkan dari budidaya lebah madu itu dipasarkan ke kota-kota besar seluruh Indonesia dengan harga Rp300 ribu per kilogram.

Terminal Kepandean Bakal Disulap Jadi Kawasan Perdagangan Modern

SERANG (IM)- Eks terminal Kepandean yang beberapa waktu lalu diratakan oleh Pemkot Serang, direncanakan akan menjadi kawasan pasar modern di Kota Serang. Perencanaan ini baru akan dilakukan pada 2022 mendatang.

Wali Kota Serang, Syafrudin mengatakan bahwa dirinya menginginkan agar eks terminal Kepandean tersebut menjadi tempat kawasan modern akan tetapi perencanaan masih belum bisa dipastikan. "Saya ingin Kepandean ini menjadi kawasan pasar modern, entah menjadi mal atau yang lainnya," katanya, Rabu (28/7).

Meski demikian, rencana tersebut bisa saja berubah, namun yang pasti perencanaan penggunaan eks terminal baru akan dikaji pada 2022 mendatang. "Nanti mudah-mudahan 2022 itu kami akan mulai menyusun Detail Engineering Design (DED) dan Feasibility Study (FS). Nah pada saat itu lah direncanakan, mau dibuat apa itu," ujarnya.

Tak hanya itu, bila keinginan itu bisa terwujud, maka pihaknya juga harus investor yang mau berinvestasi di Kota Serang. Di samping itu ia juga meyakini bahwa tempat itu cukup strategis sebagai kawasan pasar modern.

"Menurut saya tempat ini sangat strategis, tapi memang saat ini belum ada yang melirik, kita lihat ke depan," tuturnya.

Syafrudin menuturkan, bangunan eks terminal Kepandean diratakan lebih awal agar tempat itu tidak dijadikan dan diang sebagai kawasan prostitusi, namun menjadi pusat pergerakan roda ekonomi di Kota Serang.

Sebab selama ini Kepandean menjadi citra buruk sendiri bagi warga Kota Serang. "Kami programnya itu untuk menghilangkan image di masyarakat bahwa Kepandean itu merupakan tempat prostitusi. Yang penting ini berubah dulu image tempat prostitusinya. Kan biasa digunakan di bangunan-bangunan itu," terangnya. ● **pra**

BERKAPASITAS 100 TEMPAT TIDUR

Gedung BPPS akan Jadi Tempat Isolasi Pasien Positif Covid-19

LEBAK (IM)- Kontrak antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak dengan Rumah Sakit Madali yang sebelumnya menjadi Rumah Isolasi Covid-19 akan habis dan tidak diperpanjang pada bulan Agustus 2021 nanti. Hal ini mengakibatkan pasien positif Covid-19 harus dipindahkan ke tempat baru yakni Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial milik Pemprov Banten.

Gedung yang berada di Jalan Raya Ona, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten ini direncanakan akan menjadi tempat khusus isolasi para pasien positif Covid-19 beserta para tenaga kesehatannya. Satgas Covid-19 Kabupaten Lebak, Febby Rizky Pratama mengatakan, dalam gedung itu pihaknya akan menggunakan 4 ruangan, yang mana 2 ruangan akan dipakai untuk para pasien pria, 1 ruangan untuk pasien perempuan dan 1 ruangan

untuk para nakes yang bertugas di Gedung itu. Para pasien akan mulai dipindahkan pada bulan Agustus nanti, karena kontrak di Rumah Sakit sudah habis dan tidak diperpanjang, kata Febby.

Nantinya dalam 1 ruangan terdapat 7 kamar yang di setiap kamarnya terdapat dua sampai tiga bed atau tempat tidur untuk pasien penyintas. Total ruangan yang ada 100 bed dan untuk yang pria saat ini masih belum ada tempat tidurnya, kemungkinan akan kita sediakan sambil menunggu pembersihan oleh pihak BPBD Lebak. Kami akan juga menyiapkan sarana dan peralatan penunjang lainnya seperti kipas angin, dispenser, pantry dan wifi untuk pasien yang menjalani isolasi mandiri di sana. "Untuk air ada beberapa yang sudah menyala dan sebagian masih dalam perbaikan oleh kita selama satu minggu ke depan," tutup Febby. ● **pra**



BULOG SALURKAN BANTUAN BERAS PPKM DI BANTEN

Pekerja mengangkut beras bantuan PPKM saat proses penyaluran di Gudang Bulog Divre Banten, di Serang, Rabu (28/7). Kementerian Sosial bekerja sama dengan Perum Bulog menyalurkan bantuan beras kepada 1.121.398 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) masing-masing 10 kilogram guna membantu meringankan beban masyarakat terdampak pandemi dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).